

ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1997 DAN 2007

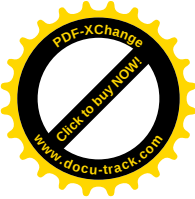
Diajukan untuk memenuhi salah satu
Syarat mencapai derajat Sarjana S – 1
Program Studi Geografi



Oleh :

DONNY TRI PRASETYA
NIRM : 00.6.106.09010.5.0168

**FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

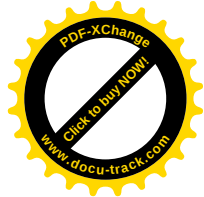
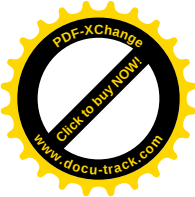
Perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Pembagiannya dapat berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu seperti : administratif, politis, ekonomi, sosial, kultural, fisis, geografis dan sebagainya. Perwilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan daerah dan mendasarkan pembagiannya pada sumberdaya lokal sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola sebaik – baiknya (Hadi Sabari Yunus, 1991).

Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah mengembangkan pembangunan wilayah – wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam hal laju pertumbuhan antar wilayah di daerah tersebut. Perkembangan daerah secara umum terstimulir oleh adanya peran suatu wilayah yang dominan dalam perkembangannya. Wilayah ini pada umumnya merupakan pusat kegiatan dalam suatu daerah (Hadi Sabari Yunus, 1991).

Persoalan kesenjangan antar wilayah senantiasa merupakan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Ketimpangan itu terutama nampak pada tidak meratanya hasil – hasil pembangunan, dimana suatu wilayah dapat mencapai perkembangan yang sangat maju sedangkan wilayah lain masih terbelakang.

Perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan sarana dan prasarana wilayah. Sarana dan prasarana terutama ekonomi seringkali memiliki peranan yang dominan dalam kemajuan suatu wilayah. Pusat perkembangan suatu wilayah yang umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan, biasanya mempunyai sarana dan prasarana yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan fungsi dan peranannya yang harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Indikator kesenjangan di Kabupaten Kudus tampak dari sumbangan PDRB masing – masing kecamatan terhadap 1 kabupaten. Pada tahun 2007, secara umum PDRB Kabupaten Kudus atas dasar hal itu adalah sebesar Rp. 248.667.749. Dari angka tersebut, penyumbang terbesar adalah Kecamatan Kota dengan sumbangan Rp.



72.126.903 diikuti oleh Kecamatan Kaliwungu dengan sumbangan Rp. 52.707.666 selanjutnya urutan ketiga adalah Kecamatan Jati dengan sumbangan Rp. 38.689.642. Adapun kecamatan yang memberikan sumbangan terkecil adalah Kecamatan Dawe dengan kontribusi sebesar Rp. 6.664.543. Dari angka – angka tersebut dapat dikategorikan kontribusi wilayah terhadap Kabupaten Kudus sebagai berikut :

$$KI = \frac{72.126.903 - 6.664.543}{3} = \frac{65.462.360}{3} = 21.820.787$$

Kontribusi Rendah : Rp. 6.664.543 - < Rp. 28.485.330

Kontribusi Sedang : Rp. 28.485.330 - < Rp. 50.306.116

Kontribusi Tinggi : Rp. 50.306.116 – Rp. 72.126.903

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan tersebut dapat dilihat tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kontribusi PDRB Kecamatan Terhadap PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2007

No	Kecamatan	PDRB (Juta Rupiah)	Kontribusi (%)	Klasifikasi Kontribusi
1.	Kaliwungu	52.707.666	21,20	Tinggi
2.	Kota	72.126.903	29,00	Tinggi
3.	Jati	38.689.642	15,56	Sedang
4.	Undaan	6.918.607	2,78	Rendah
5.	Mejobo	10.560.365	4,25	Rendah
6.	Jekulo	14.759.451	5,94	Rendah
7.	Bae	21.109.016	8,45	Rendah
8.	Gebog	25.231.556	10,15	Rendah
9.	Dawe	6.664.543	2,68	Rendah
Kabupaten Kudus		248.677.749	100,00	

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2007

Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah 42.516 ha dengan jumlah penduduk sampai tahun 2007 adalah 747.486 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan meliputi : Kecamatan Kota, Jati, Bae, Kaliwungu, Undaan, Jekulo, Dawe, Mejobo dan Gebog.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus umumnya didominasi untuk lahan persawahan yaitu sebesar 20.579 ha atau sekitar 48,40% dari keseluruhan penggunaan

lahan yang ada. Sedangkan sisanya sebesar 21.937 ha atau sekitar 51,60 % digunakan dalam kepentingan lainnya.

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kudus adalah bekerja dalam lapangan usaha industri yaitu sebesar 41,82%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Kudus Tahun 2007

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pertanian	60.642	16,17
2.	Pertambangan/Penggalian	1.150	0,31
3.	Industri	156.847	41,82
4.	Listrik, Gas dan Air	1.537	0,41
5.	Bangunan	35.849	9,56
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	55.231	14,72
7.	Transportasi/Komunikasi	17.968	4,76
8.	Keuangan	4.411	1,18
9.	Jasa – Jasa	41.551	11,08
Jumlah		375.113	100

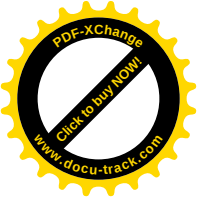
Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2007

Komposisi pendidikan tertinggi penduduk Kabupaten Kudus adalah tamat Sekolah Dasar yaitu sebanyak 228.565 jiwa dan komposisi pendidikan terendah pada tingkat Akademik/PT sebanyak 15.042. Komposisi penduduk Kabupaten Kudus menurut tingkat pendidikan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2007

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Tidak Sekolah	43.305
2.	Tidak / Belum Tamat SD	85.902
3.	Tamat SD	223.326
4.	Tamat SLTP	141.873
5.	Tamat SLTA	96.672
6.	Tamat Akademik/PT	18.009
Jumlah		609.088

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2007

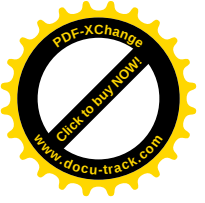


Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kudus) melalui Rancangan Umum Tata Ruang Kota Kudus Tahun 1996/1997 – 2005/2006 telah menuangkan alokasi penggunaan ruang Kota Kudus berikut :

1. Kawasan lindung
 - a. Kawasan yang melindungi kawasan bawahnya, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Gebog , Desa Ternadi dan Desa Japan di Kecamatan Dawe.
 - b. Kawasan perlindungan setempat yang meliputi :
 - Kawasan sekitar waduk, terletak di sekitar Desa Kandangmas Kecamatan Dawe.
 - Kawasan sekitar mata air, meliputi mata air yang terletak di Kecamatan Gebog, Dawe, Jekulo.
 - Kawasan sempadan sungai, meliputi garis sempadan sungai yang tidak bertanggul.
 - c. Kawasan cagar budaya yang berfungsi untuk pelestarian peninggalan purbakala serta budaya yang meliputi : kawasan sekitar Makam Sunan Muria di Desa Colo Kecamatan Dawe dan kawasan sekitar Makam Sunan Kudus di Desa Kauman Kecamatan Kota
 - d. Kawasan rawan bencana alam, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Terban, Desa Gebog, Desa Ternadi.
2. Kawasan Budidaya
 - a. Kawasan pertanian.
 - b. Kawasan non pertanian.
3. Kawasan Permukiman
4. Kawasan Perdagangan
5. Kawasan Perkantoran
6. Kawasan Pelayanan Transportasi

Usaha pemerataan pembangunan di Kabupaten Kudus telah dilakukan dengan pendekatan sub wilayah pembangunan (SWP). Sub wilayah pembangunan di Kabupaten Kudus ada 5 (lima), yaitu :

- a. Sub Wilayah Pembangunan I



Berpusat di Kecamatan Kota, meliputi Kecamatan Kota, Jati, Bae dan Mejobo. Memiliki karakteristik perkotaan yang kuat, bertopografi datar serta memiliki sarana sosial ekonomi yang cukup banyak.

b. Sub Wilayah Pembangunan II

Berpusat di Kecamatan Jekulo, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Jekulo. Belum memiliki karakteristik perkotaan, bertopografi datar serta belum memiliki sarana sosial ekonomi yang cukup banyak.

c. Sub Wilayah Pembangunan III

Berpusat di Kecamatan Gebog, meliputi Kecamatan Dawe dan Gebog. Belum memiliki karakteristik perkotaan, bertopografi berbukit serta belum memiliki sarana sosial ekonomi yang cukup banyak.

d. Sub Wilayah Pembangunan IV

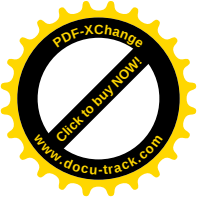
Berpusat di Kecamatan Undaan, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Undaan. Belum memiliki karakteristik perkotaan, bertopografi datar serta belum memiliki sarana sosial ekonomi yang cukup banyak.

e. Sub Wilayah Pembangunan V

Berpusat di Kecamatan Kaliwungu, meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kaliwungu. Belum memiliki karakteristik perkotaan, bertopografi datar, dekat laut serta belum memiliki sarana sosial ekonomi yang cukup banyak.

Dalam upaya untuk membuat suatu perencanaan dalam pengembangan wilayah yang optimal dan terpadu untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah ini, maka perlu diketahui bagaimana sebenarnya tingkat diferensiasi perkembangan wilayah dari masing – masing kecamatan. Hal ini dapat berguna untuk memberikan alternatif penentuan wilayah prioritas pengembangan di Kabupaten Kudus.

Bertolak dari latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah Tahun 1997 dan 2007”.



1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbedaan perkembangan wilayah antara pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus tahun 1997 dan 2007 ?
2. Bagaimanakah prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

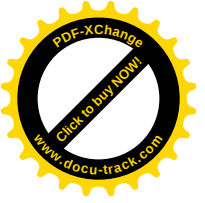
1. Mengetahui perbedaan perkembangan wilayah antara pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus tahun 1997 dan 2007.
2. Mengetahui prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk pengambilan kebijakan pengembangan wilayah.
2. Sebagai bahan studi lebih lanjut mengenai tingkat perkembangan dan kesenjangan antar wilayah khususnya tingkat kabupaten.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Pola pertumbuhan wilayah yang lazim dipergunakan adalah *spread effect* dan *backwash effect*. *Spread effect* adalah pola pertumbuhan yang dilakukan dengan memacu pertumbuhan dari suatu wilayah pusat pertumbuhan dengan harapan apabila wilayah yang telah dipacu tersebut dapat menyebarkan pertumbuhannya pada wilayah hinterland sekitarnya. Adapun *backwash effect* adalah pola pertumbuhan yang dilakukan dengan memacu wilayah hinterland untuk menunjang pertumbuhan dari wilayah yang lebih luas (dalam Agus Salim, 2000)



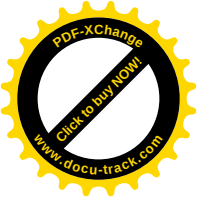
Hariri Hadi (1974, dalam Hari Sabari Yunus, 2000) menyatakan bahwa secara garis besar metode perwilayahan dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu :

- a. Penyebaran wilayah, yaitu suatu usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu.
- b. Klasifikasi wilayah, yaitu usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Penggolongan yang dimaksud harus memperhatikan keseragaman sifat dan memperhatikan individu. Usaha untuk mengubah data seperti yang terjadi dalam proses penyebaran wilayah tidak terdapat dalam klasifikasi wilayah.

Rondinelli (1995, dalam Hari Sabari Yunus, 2000), mengungkapkan indeks tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yaitu :

- a. Karakteristik sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum, produk domestik regional bruto, investasi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan hidup, tingkat kematian bayi per 100 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan.
- b. Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui persentase penyerapan tenaga kerja jumlah perusahaan komersial, luas total lahan pertanian dan produktivitas pertanian, luas lahan sawah, luas lahan pertanian untuk hidup layak.
- c. Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe dan panjang jalan.

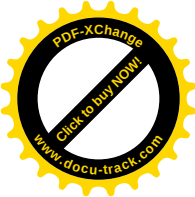
Salah satu teori yang mengemukakan tentang pembangunan wilayah adalah teori *pole de croisanne* atau *pole of growth* yang dikemukakan oleh Perroux dalam Sukirno (1976) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama, namun hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Daerah tersebut berkembang melalui saluran yang berbeda dengan hasil akhir yang ditimbulkannya berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian. Hakekat dari teori Perroux mengenai pembangunan wilayah dapat disingkat dalam beberapa aspek berikut :



1. Di dalam proses pembangunan akan muncul *L'industrie motrice* atau *industri pemimpin* yang merupakan suatu industri yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan sesuatu daerah.
2. Apabila industri – industri terkumpul dalam satu daerah atau kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengelompokan industri tadi akan menciptakan konsumen – konsumen yang mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan penduduk daerah pedesaan, seperti : permintaan untuk perumahan, pengangkutan dan jasa akan muncul; berbagai jenis produsen dan pekerja-pekerja mahir akan berkembang serta rangka dasar industri akan terbentuk.
3. Karena secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang maka sesuatu perekonomian pada hakekatnya merupakan gabungan dari sistem yang secara relatif aktif keadaannya (terdiri dari industri pemimpin dan industri yang mengelompok) serta industri – industri yang sifatnya relatif lebih pasif (terdiri dari industri – industri atau daerah – daerah yang tergantung kepada kegiatan di pusat pertumbuhan).

Jadi pada hakekatnya Perroux menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut lokasi kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi umumnya tidak merata di berbagai daerah dan mempunyai kecondongan untuk mengelompok pada pusat – pusat pertumbuhan. Pusat – pusat pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah lain yang lebih lambat perkembangan industrinya.

Muta'ali (1997) dalam penelitiannya yang berjudul ***“Tingkat Perkembangan Wilayah, Hirarki Permukiman Dan Orientasi Basis Pengembangan Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”***, bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan korelasi antara diferensiasi tingkat perkembangan wilayah dengan pemukiman. Metode penelitian yang dipergunakan adalah analisis data sekunder dengan teknik analisis melalui scoring dan klasifikasi. Variabel penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah meliputi tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan dan aksesibilitas wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan wilayah di Kabupaten Temanggung, antara daerah selatan yang relatif berkembang dengan wilayah utara yang relatif tertinggal.



Didit Hasto Hendratmoko (2005) dalam penelitiannya yang berjudul ***“Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri”***, bertujuan untuk mengetahui derajat kesenjangan perkembangan wilayah, mengetahui pola sebaran serta menentukan wilayah prioritas pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data sekunder dengan teknik analisis scalling, klasifikasi serta penggunaan analisis tetangga terdekat. Untuk mengukur perkembangan suatu wilayah digunakan variabel – variabel berikut :

- Indikator sosial ekonomi dan demografi. Indikator yang diukur adalah kepadatan penduduk, PDRB wilayah serta jumlah penduduk tamatan perguruan tinggi.
- Indikator Aksebilitas Wilayah dan Komunikasi. Indikator yang diukur adalah kepemilikan telepon dan wartel serta kepemilikan sarana transportasi.
- Indikator Pelayanan Sosial Ekonomi. Indikator yang diukur adalah pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas), pelayanan perekonomian pasar (umum, desa dan hewan) serta pelayanan pendidikan (SD, SMP, SMU, PT/Akademik).

Hal – hal yang dapat diacu oleh penulis dari penelitian di atas adalah sebagian tujuan, pengenalan terhadap variabel penelitian yang digunakan serta analisis yang digunakan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang Dilakukan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Muta’ali (1997)	Tingkat Perkembangan Wilayah, Hirarki Permukiman Dan Orientasi Basis Pengembangan Di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah	Mengetahui tingkat perkembangan wilayah dan korelasi antara diferensiasi tingkat perkembangan wilayah dengan pemukiman	Analisis data sekunder	Adanya kesenjangan wilayah di Kabupaten Temanggung, antara daerah selatan yang relatif berkembang dengan wilayah utara yang relatif tertinggal
Didit Hasto Hendratmoko (2005)	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah Untuk Pemilihan Wilayah Prioritas Pengembangan di Kabupaten Wonogiri	- Mengukur derajat kesenjangan perkembangan wilayah - Mengetahui pola sebaran - Menentukan wilayah prioritas pembangunan	Analisis data sekunder	- Terjadi kesenjangan wilayah di Kabupaten Wonogiri - Pola persebaran dari wilayah yang tidak tertinggal adalah cenderung acak.
Donny Tri Prasetya (2005)	Analisis Pertumbuhan	- Mengetahui perbedaan perkembangan	Analisis data	- Perbedaan nilai variabel yang menyebabkan

	Wilayah – Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah	wilayah antara pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus tahun 1997 dan 2007. - Mengetahui prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus	sekunder	tingkat perkembangan wilayah antara wilayah yang masuk kategori maju dengan tertinggal cukup mencolok. - Wilayah yang menjadi prioritas I dikembangkan meliputi Kecamatan Kecamatan Kaliwungu, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe.
--	--	--	----------	--

1.6 Kerangka Pemikiran

Permasalahan kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Kudus. Kesenjangan terjadi umumnya terjadi antar wilayah kecamatan. Permasalahan kesenjangan antar wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani sebab sangat terkait dengan upaya untuk pemerataan pembangunan beserta hasil – hasilnya.

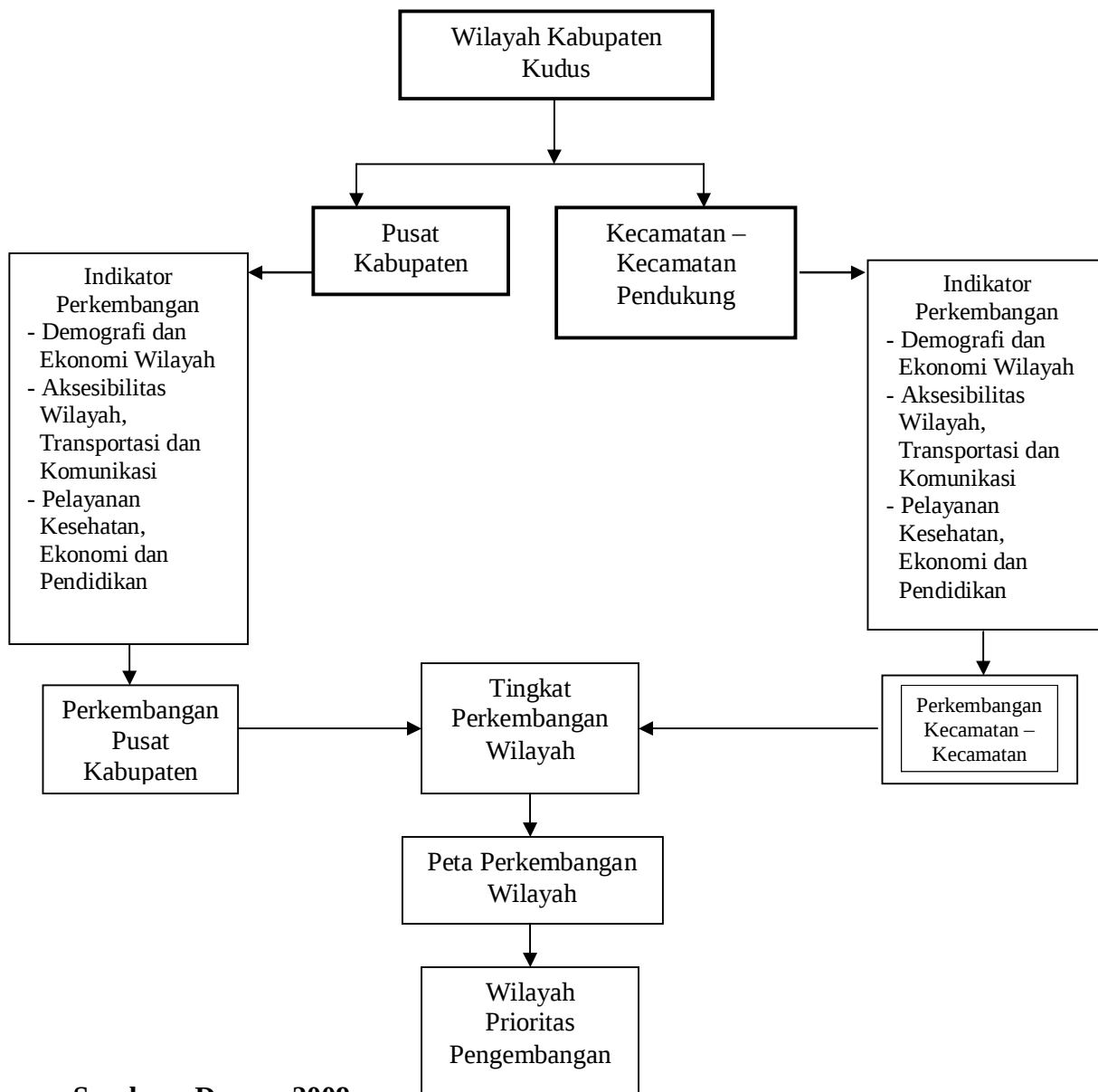
Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah adalah dengan mengetahui diferensiasi perkembangan masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangannya (*level of development*). Tingkat perkembangan wilayah sendiri merupakan ukuran peringkat secara relatif yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh tiap wilayah kecamatan sebagai hasil aktivitas pembangunan. Aspek lain yang juga penting adalah mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh dan paling dominan dalam menggambarkan tingkat perkembangan wilayah di daerah kajian baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya binaan.

Pada tahap berikutnya dilaksanakan kajian untuk mengetahui potensi wilayah meliputi potensi sumber daya lahan, sumber daya manusia dan sumber daya binaan. Tidak kalah penting pula dilakukan adalah kajian secara kualitatif menyangkut permasalahan – permasalahan wilayah penelitian yang diharapkan mampu menjelaskan karakteristik wilayah yang dikaji sehingga perencanaan yang dilakukan lebih dapat mencapai sasaran.

Hasil utama dari penelitian ini adalah untuk memilih wilayah – wilayah prioritas yang harus dikembangkan dengan deskripsi mengenai kondisi dan potensi pengembangannya. Pemilihan wilayah prioritas pengembangan ini didasarkan atas

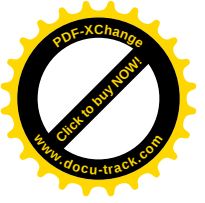
tingkat perkembangan, potensi serta permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing wilayah kecamatan. Selain itu kebijakan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat digunakan pula sebagai bahan pertimbangan sehingga wilayah prioritas pembangunan yang akan dikembangkan dapat diselaraskan dengan kebijakan yang ada. Wilayah prioritas pembangunan yang berhasil diklasifikasikan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan untuk alternatif dalam rangka mereduksi fenomena kesenjangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Kudus.

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap penjelasan pada kerangka pemikiran dapat dilihat dalam diagram alir penelitian (Gambar 1.1).



Sumber : Donny, 2009

Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder, yaitu mengolah data tahun 1997 dan 2007 yang telah ada.

1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil daerah penelitian Kabupaten Kudus yang memiliki 9 kecamatan dengan prioritas untuk pengembangan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah. Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan Kabupaten Kudus sebagai daerah penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Perkembangan wilayah kecamatan – kecamatan di Kabupaten Kudus menarik untuk dikaji karena terlihat adanya ketimpangan terutama dengan melihat pada sumbangan PDRB kecamatan terhadap PDRB kabupaten.
- b) Letak Kabupaten Kudus yang strategis pada jalur Pantai Utara Pulau Jawa.

1.7.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi, seperti : Badan Pusat Statistik, Bappeda maupun instansi kecamatan. Data - data tersebut antara lain :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. RUTRD Kabupaten Kudus | 5. Sarana Jalan |
| 2. PDRB kabupaten dan kecamatan | 6. Sarana Ekonomi |
| 3. Data – data kependudukan | 7. Sarana Pendidikan |
| 4. Sarana Komunikasi | 8. Sarana Kesehatan |
| 5. Sarana Transportasi | |

1.7.3 Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari tujuan penelitian yang ada.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah maka digunakan analisis terhadap tabel skoring dan klasifikasi. Sebelum dilakukan skoring dan klasifikasi, langkah penting yang harus dilakukan adalah memberikan asumsi terhadap indikator – indikator yang telah dipilih sebagai berikut :

Tabel 1.5. Indikator Demografi dan Ekonomi Wilayah

No	Indikator	Definisi	Asumsi terhadap perkembangan wilayah	Skor
1.	PDRB	Klasifikasi PDRB tiap – tiap kecamatan	Makin tinggi nilai PDRB menunjukkan wilayah tersebut makin berkembang	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1
2.	Kepadatan penduduk	Jumlah penduduk setiap kecamatan dibagi dengan luas kecamatan	Aktifitas ekonomi akan lebih terkonsentrasi pada wilayah dengan kepadatan yang tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk menunjukkan wilayahnya semakin berkembang.	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1
3.	Migrasi Netto	Migrasi masuk dikurangi migrasi keluar	Wilayah yang berkembang cenderung didatangi penduduk dari wilayah lain.	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1

(dalam Mut'ali, 1997)

Tabel 1.6. Indikator Aksebillitas Wilayah, Transportasi dan Komunikasi

No	Indikator	Definisi	Asumsi terhadap perkembangan wilayah	Skor
1.	Kepadatan Jalan	Panjang kelas jalan dibagi luas wilayah kecamatan	Semakin tinggi kepadatan jalan suatu wilayah maka aksesibilitas semakin tinggi sehingga kesempatan berkembang lebih besar	Tinggi = 3 Sedang = 2 Rendah = 1
2.	Sarana transportasi	Jumlah sarana transportasi (bus/minibus,mobil angkutan/truk)	Sarana transportasi mengindikasikan aksesibilitas wilayah. Semakin besar kepemilikan berarti wilayah tersebut semakin berkembang	* Skor dihitung setelah dilakukan pembobotan indikator
3.	Sarana komunikasi	Jumlah sarana komunikasi (radio dan televisi)	Sarana komunikasi mengindikasikan aksesibilitas wilayah. Semakin besar kepemilikan berarti wilayah tersebut semakin berkembang	* Skor dihitung setelah dilakukan pembobotan indikator

(dalam Mut'ali, 1997, dengan modifikasi penulis, 2009)

Tabel 1.7. Indikator Pelayanan Kesehatan, Ekonomi dan Pendidikan

No	Indikator	Definisi	Asumsi terhadap perkembangan wilayah	Skor
1.	Pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin)	Jumlah sarana kesehatan	Pelayanan kesehatan yang lebih baik (diindikasikan dengan jumlah) menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah berkembang	* Skor dihitung setelah dilakukan pembobotan indikator
2.	Pelayanan perekonomian (Pasar dan Bank)	Jumlah sarana perekonomian	Pelayanan perekonomian yang lebih baik (diindikasikan dengan jumlah) menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih berkembang	* Skor dihitung setelah dilakukan pembobotan indikator
3.	Pelayanan pendidikan (SD, SMP, SMU, PT/Akademik)	Jumlah sarana pendidikan	Pelayanan pendidikan yang lebih baik (diindikasikan dengan jumlah) menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih berkembang	* Skor dihitung setelah dilakukan pembobotan indikator

(dalam Mut'ali, 1997, dengan modifikasi penulis, 2009)

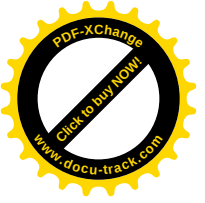
1.7.4 Menjawab Tujuan Penelitian

1. Mengetahui arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus

Untuk menentukan arahan pengembangan wilayah dilakukan dengan melakukan skoring dan klasifikasi serta reklasifikasi terhadap variabel yang telah disebutkan di atas.

2. Mengetahui perbedaan pertumbuhan wilayah pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus tahun 1997 – 2007.

Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan wilayah antara pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus antara tahun 1997 – 2007



didasarkan pada klasifikasi tingkat perkembangan wilayah, dimana wilayah yang menjadi prioritas secara berurutan adalah wilayah tertinggal, sedang, dan maju. Penentuan wilayah prioritas ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan memprioritaskan wilayah yang perkembangannya relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain maka wilayah tertinggal akan mengejar kemajuan wilayah lain.

1.8 Batasan Operasional

Tingkat perkembangan wilayah adalah ukuran rangking secara relatif yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil aktivitas pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainnya (Hadi Sabari Yunus, 1991).

Wilayah prioritas pengembangan adalah wilayah yang karena tingkat perkembangan, potensi dan permasalahannya harus diprioritaskan untuk dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah (Hadi Sabari Yunus, 1991).

Wilayah tertinggal adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat perkembangan wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya binaan lebih rendah dari rata – rata kondisi wilayah lain dalam lingkup regional.

Wilayah sedang adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat perkembangan wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya binaan sama dengan rata – rata kondisi wilayah lain dalam lingkup regional.

Wilayah maju adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat perkembangan wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya binaan lebih tinggi dari rata – rata kondisi wilayah lain dalam lingkup regional.

Wilayah pusat dalam penelitian dimaksud adalah wilayah kecamatan yang secara de facto (kenyataan) maupun de jure (hukum perundangan) menjadi pusat pelayanan, biasanya mempunyai sarana dan prasarana yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sehingga mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Wilayah pendukung dalam penelitian dimaksud adalah wilayah yang berada di sekitar wilayah pusat yang memperoleh pelayanan dari wilayah pusat namun juga memberikan dukungan kepada wilayah pusat sumberdaya yang tidak dimiliki wilayah pusat.